

**ANALYSIS OF THE FLYPAPER EFFECT ON LOCAL ORIGINAL REVENUE,
GENERAL ALLOCATION FUNDS, REVENUE SHARING FUNDS AND BUDGET
SURPLUS ON LOCAL EXPENDITURE IN THE PROVINCE OF WEST NUSA
TENGGARA**

**ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

Yulia Hafijah¹, Himawan Sutanto², Ahmad Zaenal Wafik³

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram^{1,2,3}

yuliahafizah320@gmail.com¹, sutanto2003@unram.ac.id², azaenal_wafik@unram.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Local Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU), Revenue Sharing Funds (DBH), and Budget Surplus (SiLPA) on Local Expenditures and to examine the existence of the flypaper effect in West Nusa Tenggara Province. Panel data for the 2018-2024 period were processed using the panel data regression method with EViews version 12 software. The results of the study show that PAD has a significant positive effect (coefficient 3.460319 ; p-value 0.0000) and DAU has a significant positive effect (coefficient 3.213619; p-value 0.0010), while DBH and SiLPA are not significant. The R-squared value of 0.9274 indicates that 92.74% of the variation in Regional Expenditure can be explained by the model. The PAD coefficient exceeding DAU confirms the absence of a flypaper effect, indicating that PAD optimization is greater than local governments' dependence on central transfer funds (DAU). The recommendation is for local governments to enhance the effectiveness and efficiency of utilizing transfer funds from DAU by strengthening mechanisms for transparency, accountability, and oversight.

Keywords: Flypaper Effect, Regional Expenditure, PAD, DAU, DBH, SiLPA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Belanja Daerah serta menguji keberadaan flypaper effect di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data panel periode 2018-2024 diolah menggunakan metode regresi data panel dengan perangkat lunak EViews versi 12. Hasil studi menunjukkan PAD berpengaruh positif signifikan (koefisien 3,460319 ; p-value 0,0000) dan DAU berpengaruh positif signifikan (koefisien 3,213619; p-value 0,0010), sementara DBH dan SiLPA tidak signifikan. R-squared bernilai 0,9274 menandakan 92,74% variasi Belanja Daerah dapat diterangkan model. Koefisien PAD yang melampaui DAU mengkonfirmasi tidak adanya flypaper effect, menggambarkan bahwa optimalisasi PAD lebih besar daripada ketergantungan pemda terhadap dana transfer pusat DAU. Rekomendasi yang diajukan adalah agar pemerintah daerah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana transfer yang berasal dari DAU, dengan memperkuat mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan.

Kata kunci: Flypaper Effect, Belanja Daerah, PAD, DAU, DBH, SiLPA

PENDAHULUAN

Kebijakan yang tersentralisasi menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidaksesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat lokal di beberapa daerah atau pertumbuhan yang terkonsentrasi. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai bentuk reformasi guna mewujudkan

pemerintahan yang lebih baik. Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, kewenangan, serta tanggung jawab bagi daerah otonom dalam mengelola dan menangani urusan pemerintahan beserta kepentingan warga setempat, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. (Rizki Ramadhani et al., 2022).

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Indonesia hingga tahun 2025

menghadapi tantangan nyata, seperti melemahnya semangat desentralisasi akibat regulasi sektoral yang mengambil alih kewenangan daerah. Hal ini telah menyebabkan penurunan efektivitas layanan publik dan melemahnya daya saing daerah. Meskipun demikian, otonomi daerah masih diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah dengan pembangunan yang adil dan keadilan sosial melalui sinergi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pengaturan yang menyeluruh terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini menekankan pengelolaan transfer dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah berdasarkan prinsip efisiensi dan kinerja, yang diharapkan bisa meningkatkan layanan publik. Undang-undang ini juga memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak serta retribusi daerah dengan melakukan penyederhanaan klasifikasi retribusi menjadi tiga kategori, yakni retribusi layanan publik, pungutan atas layanan komersial, dan biaya untuk izin tertentu. Selain itu, harmonisasi kebijakan fiskal nasional menjadi aspek penting untuk menjaga keselarasan diantara pemerintah pusat dan daerah sesuai pada prinsip otonomi daerah. Pendekatan digunakan mencakup restrukturisasi pajak dan retribusi daerah, penerapan mekanisme transfer berbasis kinerja, serta tata kelola belanja daerah yang lebih akuntabel. Dengan demikian, regulasi ini menjadi dasar hukum yang kokoh bagi pemerintah pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara otonom dan berkelanjutan guna mendorong pembangunan di tingkat

daerah maupun nasional (Sofhia & Priyambodo, 2024).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah meliputi seluruh jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah beserta pengeluaran lainnya yang dianggap sebagai pengurangan ekuitas dan selama tahun fiskal, daerah diwajibkan untuk melakukan pengeluaran guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengeluaran tersebut meliputi pengeluaran konsumsi, investasi, dan transfer, dengan tujuan utama guna meningkatkan mutu pelayanan publik dengan cara yang efisien dan efektif sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kebijakan pengeluaran daerah diarahkan agar anggaran dialokasikan secara responsif terhadap kebutuhan layanan publik yang terus berkembang dan memprioritaskan program-program yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan asli daerah berperan sebagai salah satu pilar utama yang sangat penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan serta mendukung proses pembangunan di wilayah-wilayah di Indonesia. Dalam konteks Melalui desentralisasi fiskal, kewenangan pemerintah daerah diperluas sehingga mereka dapat mengatur dan mengelola sumber daya mereka sendiri pendapatan sendiri sdn pemerintah daerah mendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui transfer. Sumber pendapatan utama pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Di samping ketiga sumber pendapatan tersebut, terdapat pula Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang ialah akumulasi sisa dana dari realisasi APBD sebelumnya juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan daerah pada tahun berjalan.

Tingkat kemandirian suatu daerah dalam pengelolaan sumber daya dapat tercermin melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ketidak mampuan pemerintah daerah dalam memenuhi target pendapatan menyebabkan ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan kekeliruan dalam respons ketergantungan pemerintah daerah pada dana pemerataan fiscal atau dana perimbangan, terutama DAU, dapat menimbulkan flypaper effect. Situasi ini terbentuk ketika pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengeluaran daerah lebih signifikan daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, sikap pemerintah daerah sudah menyimpang dalam mengalokasikan belanja tanpa adanya peningkatan yang seimbang pada pendapatan asli daerah (PAD). (Kusyala & Badrudin, 2023)

Fenomena Flypaper Effect menjadi perhatian didalam kajian keuangan daerah karena sifatnya yang unik dalam memengaruhi pola belanja pemerintah daerah. flypaper effect, yaitu kondisi dimana kenaikan dana transfer eksternal mendorong peningkatan pengeluaran di daerah-daerah tanpa diimbangi upaya untuk menaikkan pendapatan asli daerah (Siregar et al., 2025). Kondisi ini menjadi penting untuk dianalisis karena berkaitan dengan efisiensi alokasi anggaran dan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa studi empiris sebelumnya telah menguji Flypaper Effect di berbagai daerah, namun

hasilnya seringkali bervariasi tergantung pada karakteristik fiskal, kapasitas pengelolaan keuangan, serta faktor kelembagaan di masing-masing wilayah.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait keberadaan dan signifikansi flypaper effect di daerah-daerah Indonesia. Sebagai contoh, penelitian terbaru di Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu 2016-2022 menemukan bahwa beberapa daerah tidak mengalami flypaper effect dengan pengaruh PAD yang lebih signifikan dibandingkan dana transfer pada belanja daerah, menunjukkan adanya variasi pola pengelolaan keuangan daerah (Zakaria1 & Lathifah2, 2024). Penelitian di Aceh menemukan bahwa walaupun nilai koefisien DAU menunjukkan angka yang lebih besar daripada PAD, kondisi ini tidak membuktikan keberadaan flypaper effect pada belanja regional (Yani Rizal et al., 2021). Namun, studi lain di Kabupaten/Kota di pulau Sumatra menemukan bukti flypaper effect, di mana baik PAD maupun DAU secara signifikan mempengaruhi besaran belanja daerah (Abdullah, 2020).

Berdasarkan variasi hasil penelitian sebelumnya, tampak bahwa flypaper effect di Indonesia tidak selalu terjadi secara merata di seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik fiskal tiap wilayah. Dengan demikian, penekanan utama dalam penelitian ini terletak pada “Analisis Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.” Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang meliputi dua pulau utama, yaitu Lombok dan Sumbawa. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari 10

kabupaten dan kota, dengan total luas wilayah daratan sekitar 20.153,15 km².(Mukriyanto, 2022) Dari sisi keuangan daerah, NTB memiliki kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan Pendapatan dan belanja daerah, terutama dalam konteks penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Variasi sumber pendapatan ini menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, NTB menjadi daerah studi yang sangat relevan untuk menguji Flypaper Effect dalam bidang keuangan publik, khususnya bagaimana transfer dana dari pemerintah pusat dan akumulasi SiLPA memengaruhi pola belanja pemerintah daerah. Pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi dan fiskal NTB akan sangat membantu dalam menganalisis dampak kebijakan fiskal pusat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah di provinsi ini. Dengan kondisi ekonomi yang sedang menghadapi tantangan sekaligus potensi pemulihan yang cukup besar melalui diversifikasi ekonomi, analisis Flypaper Effect pada sumber pendapatan utama dan SiLPA di NTB menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran realistik dan rekomendasi kebijakan yang efektif bagi peningkatan kinerja fiskal dan pelayanan publik di daerah ini. Dengan memahami fenomena ini, diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan mendukung desentralisasi yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena berfokus pada konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan dinamika fiskal

berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam model analisis flypaper effect sesuatu yang masih jarang dilakukan pada penelitian serupa.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Flypaper Effect

Flypaper effect merupakan anomali dalam teori bantuan tanpa syarat (unconditional grants) yang menunjukkan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat mampu meningkatkan belanja barang publik daerah, namun tidak mensubstitusi penerimaan pajak daerah. Menurut Oates (1999) dalam (Septriani, 2023), menjelaskan bahwa flypaper effect terjadi ketika responsivitas belanja pemerintah daerah terhadap dana transfer melebihi responsivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Argumen ini didukung oleh Tumbul dalam Megasari (2015) yang dikutip (Septriani, 2023), yang menyatakan bahwa fenomena flypaper effect mengindikasikan kecenderungan dana transfer mendorong ekspansi belanja daerah dengan magnitude yang lebih besar dibandingkan nilai nominal transfer yang diterima.

Flypaper effect juga menggambarkan kondisi di mana pemda lebih mengutamakan penggunaan dana transfer dari pusat untuk keperluan belanja dibandingkan dengan memanfaatkan sumber PAD miliknya sendiri (Zakaria1 & Lathifah2, 2024). Flypaper Effect dapat terjadi jika pemerintah daerah lebih cenderung merespons peningkatan pengeluaran daerahnnya dari transfer atau hibah, khususnya transfer tanpa syarat, daripada mengoptimalkan potensi sendiri yang direpresentasikan oleh Pendapatan Pemerintah Daerah.

Fenomena ini berdampak pada pemborosan dalam pengeluaran daerah. Dalam konteks ini, hibah tanpa syarat tersebut biasanya direpresentasikan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh Pemda (Fikri, 2020).

Fenomena flypaper effect membawa tiga dampak utama terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pertama, flypaper effect menyebabkan ineffisiensi anggaran dimana pemerintah daerah cenderung mengalokasikan dana transfer secara tidak efisien tanpa mempertimbangkan prioritas pembangunan strategis. Dana transfer lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasional yang bersifat konsumtif seperti belanja pegawai dan barang/jasa, daripada belanja modal yang produktif dan memberikan dampak jangka panjang. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kualitas output pembangunan karena fokus lebih pada kuantitas belanja daripada kualitas dan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Kedua, flypaper effect mendorong peningkatan pengeluaran daerah yang tidak proporsional. Peningkatan dana transfer menyebabkan kenaikan belanja daerah dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan jika peningkatan berasal dari PAD. Pemerintah daerah mempersepsikan dana transfer sebagai "uang gratis" sehingga cenderung membelanjakannya secara berlebihan tanpa perencanaan matang, yang berpotensi menimbulkan pemborosan dan penggunaan dana yang kurang tepat sasaran. Ketiga, flypaper effect menciptakan ketergantungan fiskal tinggi terhadap pemerintah pusat dimana daerah terlalu mengandalkan dana transfer sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Hal ini mengurangi insentif untuk mengoptimalkan potensi PAD melalui penguatan kapasitas pemungutan dan penggalian potensi pendapatan baru,

sehingga kemandirian fiskal daerah menjadi lemah dan menghambat pencapaian tujuan desentralisasi fiskal. Ketergantungan ini juga membuat pemerintah daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut konsep agen, pemerintah daerah bertindak sebagai agen dalam proses penyeimbangan distribusi dana, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai prinsip dalam konteks pengelolaan anggaran publik. Pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengawasi berbagai urusan pemerintahan di wilayah masing-masing. Sebagai implikasi dari kebijakan ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana guna mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah secara mandiri. Dana perimbangan tersebut kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (agen) untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat (prinsipal) (Fadilah & Helmayunita, 2020). Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan kepentingan antara keduanya yang menimbulkan masalah *asimetri informasi*, di mana pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih rinci tentang kondisi fiskal dan kebutuhan lokal dibandingkan pemerintah pusat. Ketidakseimbangan informasi ini dapat menyebabkan pemerintah daerah bertindak tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemerintah pusat, misalnya dengan mengalokasikan dana transfer lebih besar untuk belanja daerah tanpa diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini dikenal sebagai *flypaper effect*, yaitu ketika dana transfer dari pusat lebih mudah "menempel" dan digunakan

untuk membiayai belanja daerah dibandingkan dana yang bersumber dari PAD. Dengan demikian, *flypaper effect* merupakan bentuk manifestasi dari konflik keagenan dalam pengelolaan keuangan publik, di mana perilaku pemerintah daerah sebagai *agent* tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan *principal* dalam mencapai efisiensi dan kemandirian fiskal. Teori kagenan menyoroti bahwa pejabat pemerintah sebagai agen cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik, sehingga transparansi dan akuntabilitas hal ini menjadi sangat krusial. Guna meminimalkan risiko tersebut, pemerintah daerah perlu menerapkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang efektif, memperluas akses informasi publik, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan guna membangun kepercayaan dan menjaga integritas dalam administrasi public (Siregar et al., 2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Istilah "pendapatan asli daerah" (PAD) mengacu pada penerimaan yang bersumber dari eksploitasi potensi ekonomi lokal di wilayah daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, komponen PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kapasitas fiskal dan potensi ekonomi setiap daerah mempengaruhi seberapa besar variasi PAD di antara mereka, dengan demikian, PAD menjadi indikator tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk pengeluaran public (Setiawan & Yogantara, 2022).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Sebagai upaya mengatasi ketimpangan kapasitas fiskal regional, pemerintah daerah menerima Dana

Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBN. Sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAU bertujuan menunjang pelaksanaan desentralisasi fiskal (Dewi, 2017). DAU bersifat unconditional grant yang memberikan diskresi kepada pemerintah daerah dalam pengalokasian dana sesuai prioritas pembangunan. Distribusinya ditentukan melalui formula celah fiskal yang mengukur disparitas antara kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah, sehingga wilayah dengan kapasitas terbatas namun kebutuhan substansial memperoleh porsi lebih tinggi untuk menjamin kecukupan pelayanan publik.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah komponen pendapatan negara yang didistribusikan ke pemda sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam APBN. DBH berperan sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung kebutuhan daerah sekaligus menjadi instrumen desentralisasi fiskal guna memperkuat otonomi daerah melalui distribusi kewenangan dan sumber daya keuangan yang lebih proporsional (Istiqomah & Amran, 2021).

DBH diklasifikasikan ke dalam dua kategori pokok, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH Pajak bersumber dari penerimaan perpajakan pusat meliputi PBB, PPh Pasal 25 dan 29 WPOPDN, serta PPh Pasal 21. Sedangkan DBH SDA berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang mencakup sektor kehutanan (IIUPH, PSDH, dan Dana Reboisasi), pertambangan minerba (Iuran Tetap dan Royalty), perikanan (pungutan pengusahaan dan hasil perikanan), serta migas dan panas bumi. Setiap jenis DBH memiliki proporsi pembagian berbeda antara pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan memberikan insentif kepada daerah penghasil sumber daya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Perbedaan antara surplus atau defisit anggaran dan pembiayaan bersih dikenal sebagai Sisa lebih perhitungan anggaran Anggaran (SiLPA), menurut Direktorat Jenderal Keseimbangan Fiskal, idealnya nilai SiLPA berada pada posisi nol, namun dalam praktiknya banyak daerah justru memiliki SiLPA yang cukup besar. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh keterlambatan pengesahan APBD di tingkat DPRD, sehingga realisasi anggaran tertunda dan baru dapat dijalankan pada pertengahan tahun. Akibatnya, sebagian alokasi anggaran tidak terserap hingga akhir tahun dan tercatat sebagai SiLPA (Wira & Dewi, 2023).

Belanja Daerah (BD)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menetapkan bahwa semua komitmen yang diakui oleh pemerintah daerah sebagai penurunan kekayaan bersih selama periode fiskal saat ini dianggap sebagai belanja daerah. Dana-dana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan baik program pemerintah yang wajib maupun yang bersifat pilihan di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, belanja daerah terdiri atas dua kategori, yaitu Belanja Operasional dan Belanja Modal. Belanja Operasional merupakan pengeluaran untuk kegiatan operasional yang memberikan manfaat dalam jangka pendek dan habis pakai dalam satu periode anggaran, mencakup komponen belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Belanja ini bersifat konsumtif dan digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan serta pelayanan publik. Sementara itu, Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk akuisisi atau penambahan aset tetap dengan manfaat jangka panjang, meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, infrastruktur jalan dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Belanja Modal bersifat investasi jangka panjang dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur serta peningkatan kapasitas pelayanan publik.

Berdasarkan teori keuangan daerah, belanja pemerintah daerah dipengaruhi oleh kemampuan fiskal yang bersumber dari PAD, DAU, DBH, dan SiLPA. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat sering kali menimbulkan fenomena *flypaper effect*, yaitu kondisi di mana belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menduga bahwa PAD, DAU, DBH, dan SiLPA terhadap Belanja Daerah, serta menguji keberadaan *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Untuk menguji fenomena *flypaper effect* dan dampak Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap belanja daerah Provinsi NTB, penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi data panel. Sumber data sekunder berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI, dengan periode pengamatan tahun 2018-2024. Pemilihan periode tujuh tahun tersebut dianggap cukup representatif untuk mengidentifikasi tren dan pola

konsistensi terjadinya flypaper effect di wilayah NTB. Data mencakup variabel-variabel keuangan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan dasar pengujian asumsi klasik dan hipotesis penelitian. Analisis serta pengolahan data dilakukan melalui program statistik EViews 12.

Analisis Regresi Data Panel

Konsep data panel dibentuk dari dua karakteristik jenis data, yaitu data cross-sectional serta data time-series. Sementara data time-series menampilkan rentang data yang dikumpulkan dari satu objek selama periode waktu lebih dari satu tahun, data cross-sectional menampilkan jumlah objek yang diamati selama periode waktu tertentu (Purnamawati & Making, 2021).

Penelitian ini menggunakan data panel karena periode penelitian melebihi satu tahun dan melibatkan beberapa kabupaten/kota. Aspek time series diwakili oleh tujuh periode tahunan dari 2018 hingga 2024, sementara aspek cross section tercermin dalam 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bentuk persamaan regresi yang dipakai dalam studi ini adalah sebagai berikut:

$$BDit = \beta_0 + \beta_1 PADit + \beta_2 DAUit + \beta_3 DBHit + \beta_4 SiLPAit + eit$$

Dimana:

- $BDit$ adalah belanja daerah
- β_0 adalah konstanta/intercept
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen

- eit adalah error term
- t adalah time series
- i adalah cross section

Pada teknik regresi data panel, tersedia tiga bentuk model estimasi yang digunakan, yakni:

a. Uji chow

Dua model regresi yang diaplikasikan dalam uji ini adalah Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Pengujian dilakukan untuk memilih model yang paling cocok digunakan dalam estimasi data panel. Kriteria dalam uji Chow adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas chi-square lebih besar dari 5 persen, maka H_0 diterima dan model yang tepat untuk digunakan adalah Common Effect Model (CEM).
2. Jika nilai probabilitas chi-square kurang dari 5 persen, maka H_0 ditolak dan model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM), diikuti dengan uji Hausman.

b. Uji Hausman

Uji ini bertujuan memilih model yang paling cocok antara Fixed Effect Model (FEM) dengan Random Effect Model (REM). Pelaksanaan uji Hausman menjadi tahap selanjutnya setelah uji Chow diselesaikan.

Kriteria dalam uji Hausman sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas chi-square lebih besar dari 5 persen, maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah Random Effect Model (REM).
2. Jika nilai probabilitas chi-square kurang dari 5 persen, maka H_0 ditolak dan model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji ini dilakukan jika:

1. Uji Chow menggunakan model Common Effect, dan
2. Uji Hausman menggunakan model Random Effect, maka uji Lagrange Multiplier (LM) dilakukan untuk memastikan pilihan antara Common Effect dan Random Effect.

Kriteria yang dipakai dalam uji Lagrange Multiplier yakni:

1. Jika prob chi-squarennya lebih kecil dari 5 persen berarti H_0 ditolak, maka alat yang dikenakan yakni Random Effect Model (REM).
2. Jika prob chi-squarennya lebih besar dari 5 persen berarti H_0 diterima, maka alat yang dikenakan yakni Common Effect Model (CEM).

Pengujian Asumsi Klasik

Uji ini terdiri dari empat jenis uji yaitu, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Tujuan dari uji-uji ini adalah untuk mendeteksi potensi masalah normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas dalam model estimasi. Namun, uji autokorelasi tidak dilakukan karena uji ini hanya relevan untuk data deret waktu.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah prosedur pengujian yang dimaksudkan untuk memeriksa apakah residual dalam model berdistribusi normal atau tidak Mardiatmoko, (2020) dalam (Zakaria1 & Lathifah2, 2024). Dalam hal ini, tersedia dua cara yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah residu terdistribusi secara normal atau tidak, yaitu melalui analisis grafis dan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Dalam studi ini, uji Jarque-Bera dipilih, yang merupakan uji normalitas untuk sampel besar.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah mendeteksi adanya korelasi linier sempurna atau hampir sempurna antara

variabel bebas pada model regresi. Keberadaan multikolinearitas dapat dideteksi dari besaran koefisien korelasi antarvariabel. Jika koefisien korelasi tidak mencapai 0,8, maka model dapat dianggap tidak mengalami masalah multikolinearitas Mardiatmoko, (2020) dalam (Zakaria1 & Lathifah2, 2024)

c. Uji Hetroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji keseragaman varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang memenuhi asumsi klasik memiliki varians residual konstan (homoskedastisitas). Sebaliknya, jika varians residual tidak konstan antar observasi, maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menyebabkan estimator tidak efisien dan standard error menjadi bias, sehingga hasil uji statistik menjadi tidak reliable (Mokosolang et al., 2015).

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser adalah salah satu metode statistik untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada model regresi linier. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual tidak seragam di seluruh level variabel independen, yang dapat memengaruhi validitas inferensi statistik seperti uji t dan F. Uji ini dikembangkan oleh Herbert Glejser pada tahun 1969 dan merupakan varian dari uji heteroskedastisitas lainnya, seperti uji Breusch-Pagan atau White.(Halunga et al., 2017).

Apabila hasil pengujian menunjukkan adanya heteroskedastisitas, maka dilakukan koreksi dengan menggunakan White cross-section robust standard errors. Metode ini mengoreksi standard error tanpa mengubah nilai koefisien regresi, sehingga hasil uji hipotesis tetap valid dan reliable meskipun asumsi homoskedastisitas dilanggar.

Penggunaan robust standard errors merupakan solusi yang banyak direkomendasikan dalam penelitian dengan data panel (Millo, 2017).

Uji Hipotesis

a. Uji Parsial

Uji parsial dilakukan untuk mengukur derajat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual.

b. Uji Simultan

Untuk menganalisis pengaruh secara bersamaan variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan uji Simultan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengindikasikan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Rentang nilai R^2 antara nol hingga satu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum memulai estimasi parameter pada regresi data panel, langkah awal yang harus ditempuh adalah memilih model yang sesuai melalui serangkaian prosedur uji pemilihan model. Uji Chow merupakan salah satu pengujian penting dalam tahapan ini yang berfungsi menentukan model yang paling tepat diaplikasikan. Dalam uji tersebut, apabila probabilitas dari statistik Chi-square menunjukkan nilai di atas 0,05, maka Common Effect Model yang digunakan. Sebaliknya, ketika probabilitas Chi-square yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka Fixed Effect Model dianggap lebih sesuai dalam analisis regresi data panel tersebut. Dengan demikian, keputusan pemilihan model berdasarkan hasil Uji Chow sangat berpengaruh terhadap keakuratan dan validitas estimasi parameter yang akan diperoleh (Istiqomah & Amran, 2021).

a. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.712034	(9,56)	0.0000
Cross-section Chi-square	56.435624	9	0.0000

Gambar 1. Hasil Uji Chow

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2025)

Hasil pengolahan data pada tabel menunjukkan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol (H_0) tidak diterima. Konsekuensi dari penolakan hipotesis nol ini mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, pendekatan Fixed Effect Model (FEM) merupakan metode analisis regresi yang paling tepat dan sesuai untuk diimplementasikan. Temuan statistik ini memberikan dasar empiris yang kuat untuk memilih FEM sebagai model analisis utama.

Setelah menentukan model Fixed Effect sebagai pilihan awal dalam analisis data panel, langkah selanjutnya yang sangat penting dilakukan adalah uji Hausman. Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan model yang paling optimal antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model sebagai pendekatan analisis yang tepat dalam penelitian. Pada uji Hausman, fokus utamanya adalah pada nilai probabilitas Chi-square yang dihasilkan dari pengujian tersebut. Jika nilai probabilitas Chi-square yang diperoleh lebih besar dari 0,05 (nilai signifikansi), maka model yang sebaiknya dipilih adalah Random Effect Model karena dianggap lebih efisien dan konsisten dalam konteks tersebut. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas Chi-square kurang dari 0,05, maka Fixed Effect Model lah yang menjadi pilihan paling tepat karena memberikan hasil estimasi yang lebih konsisten. Dengan demikian, uji Hausman memegang peranan krusial dalam memastikan keputusan pemilihan

model regresi yang optimal dan valid khususnya ketika bekerja dengan data panel, sehingga analisis yang diperoleh dapat dipercaya dan akurat.

b. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	54.219787	4	0.0000

Gambar 2. Hasil Uji Hausman
Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2025)

Uji Chi-square menghasilkan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 0,05, menandakan penolakan terhadap hipotesis nol (H_0). Maka dari itu, kesimpulannya adalah Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling cocok digunakan.

Kesimpulan ini dilandasi oleh temuan konsisten dari uji Chow dan uji Hausman yang menunjukkan bahwa model Fixed Effect memiliki keunggulan dibandingkan model alternatif lainnya dalam analisis data penelitian ini. Perlu untuk dijelaskan bahwa dalam penelitian ini, uji Lagrange Multiplier (LM) tidak digunakan sebagai bagian dari prosedur pemilihan model, hal ini disebabkan uji LM secara spesifik dikembangkan untuk melakukan perbandingan dan seleksi antara Random Effect Model (REM) dengan Common Effect Model (CEM) secara eksklusif, sehingga tidak relevan apabila digunakan dalam konteks pemilihan antara Fixed Effect Model dan model lainnya. Oleh sebab itu, pemilihan Fixed Effect Model sebagai model terbaik dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan metodologis yang tepat dan didukung oleh hasil uji statistik yang valid, sehingga model tersebut mampu menangkap heterogenitas antar unit cross-section secara lebih akurat dan memberikan estimasi parameter yang

lebih konsisten dalam konteks analisis data panel yang digunakan.

Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: BD
Method: Panel Least Squares
Date: 10/01/25 Time: 14:52
Sample: 2018 2024
Periods included: 7
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1367.268	605.2378	-2.259059	0.0278
PAD	3.450319	0.293163	11.76927	0.0000
DAU	3.213619	0.922179	3.484810	0.0010
DBH	-0.279707	0.438015	-0.638578	0.5257
SILPA	1.457766	0.815964	1.786557	0.0794

Gambar 3. Hasil Estimasi FEM

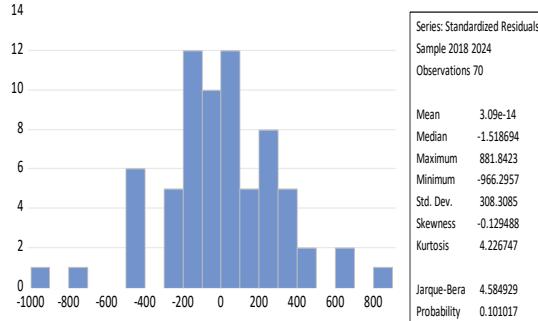
Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2025)

Hasil estimasi model pada gambar menunjukkan bahwa nilai konstanta (C) adalah -1367,268. Adapun koefisien untuk setiap variabel penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: variabel PAD memiliki koefisien sebesar 3,450319, variabel DAU menunjukkan koefisien 3,213619, variabel DBH memperlihatkan koefisien -0,279707, sedangkan variabel SiLPA menunjukkan koefisien 1,457766. Berdasarkan koefisien yang diperoleh, maka dapat disusun formulasi persamaan model regresi panel data sebagai berikut:

$$BD = -1367,268 + 3,450319 * PAD + 3,213619 * DAU - 0,279707 * DBH + 1,457766 * SILPA + eit$$

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2025)

Berdasarkan output yang ditampilkan dalam gambar, nilai probabilitas uji Jarque-Bera memperlihatkan angka 0,101017. Karena nilai probabilitas ini melebihi batas signifikansi 0,05, maka tidak ditemukan bukti yang memadai untuk menolak hipotesis nol. Hal ini

mengindikasikan bahwa residual dalam model mengikuti distribusi normal. Terpenuhinya kondisi normalitas residual ini memperkuat keandalan hasil estimasi model yang telah dilaksanakan dalam studi ini, sekaligus membuktikan bahwa asumsi dasar normalitas telah terpenuhi dengan baik.

b. Uji Multikolinearitas

Gambar 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU	DBH	SiLPA
PAD	1.000000	0.38157326	-0.0449313	-0.1128964
DAU	0.38157326	1.000000	-0.2044527	-0.1944565
DBH	-0.0449313	-0.2044527	1.000000	0.57522535
SiLPA	-0.1128964	-0.1944565	0.57522535	1.000000

Sumber: Eviews 12 (Data diolah 2025)

Hasil analisis yang disajikan pada gambar menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antarregresor, yang mencakup variabel independen PAD, DAU, DBH, dan SILPA, berada di bawah angka 0,8. Hasil analisis ini mengindikasikan tidak adanya korelasi signifikan antar variabel independen dalam model regresi. Oleh karena itu, model tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas. Dengan demikian, variabel independen dalam penelitian ini tidak menunjukkan keterkaitan yang kuat antar sesamanya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya bias atau ketidakstabilan pada estimasi nilai koefisien regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/09/2025 Time: 17:55				
Sample: 2018-2020				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 70				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	143.4861	323.4756	0.443576	0.6591
PAD	0.589371	0.156684	3.761523	0.0004
DAU	-0.117801	0.492868	-0.239010	0.8120
DBH	-0.508270	0.234102	-2.171149	0.0342
SILPA	0.633494	0.436100	1.452634	0.1519
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.462697	Mean dependent var	200.9808	
Adjusted R-squared	0.337843	S.D. dependent var	215.6282	
S.E. of regression	175.4632	Akaike info criterion	13.34959	
Sum squared resid	1724091.	Schwarz criterion	13.79929	
Log likelihood	-452.2357	Hannan-Quinn criter.	13.52622	
F-statistic	3.70806	Durbin-Watson stat	1.736787	
Prob(F-statistic)	0.000294			

Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada tabel output EViews, diperoleh nilai probabilitas (p-value) untuk masing-masing variabel sebagai berikut: PAD sebesar 0,0004, DAU sebesar 0,8120, DBH sebesar 0,0342, dan SILPA sebesar 0,1519. Dari hasil tersebut terlihat bahwa dua variabel, yaitu PAD, dan DBH memiliki nilai probabilitas di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual, yang berarti model mengalami heteroskedastisitas.

Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menggunakan White heteroskedasticity-consistent standard errors atau yang dikenal sebagai robust standard errors (Collins et al., 2021). Metode ini tidak berusaha menghilangkan heteroskedastisitas dari data, melainkan mengoreksi standard errors agar tetap konsisten dan valid meskipun terdapat heteroskedastisitas.

Perbaikan Model dengan White Robust Standard Error

Gambar 7. Hasil Estimasi Regresi Panel dengan Robust Standard Errors

Dependent Variable: BD				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/03/25 Time: 15:08				
Sample: 2018-2024				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 70				
White cross-section (period cluster) standard errors & covariance (d.f. corrected)				
Standard error and t-statistic probabilities adjusted for clustering				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1367.268	1127.945	-1.212176	0.2710
PAD	3.450319	0.385098	8.959578	0.0001
DAU	3.213619	1.759606	1.826328	0.1176
DBH	-0.279707	0.541895	-0.516165	0.6242
SILPA	1.457766	0.752476	1.937292	0.1008
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.927462	Mean dependent var	1896.647	
Adjusted R-squared	0.910623	S.D. dependent var	1098.141	
S.E. of regression	328.2997	Akaike info criterion	14.60259	
Sum squared resid	6035720.	Schwarz criterion	15.05229	
Log likelihood	-497.0906	Hannan-Quinn criter.	14.78121	
F-statistic	55.07789	Durbin-Watson stat	1.570970	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2025)

Penggunaan White Cross-section (period cluster) Standard Errors dalam estimasi Fixed Effect Model (FEM) secara implisit mengonfirmasi adanya masalah Heteroskedastisitas dalam data, yang merupakan pelanggaran terhadap asumsi regresi klasik. Metode *robust* ini berfungsi sebagai solusi statistik, di mana ia mengoreksi bias pada perhitungan *Standard Error* tanpa perlu mengubah model FEM yang sudah terpilih. Hal ini memastikan bahwa nilai-nilai t-Statistic dan Probabilitas (p-value) yang dihasilkan (seperti 0.0001 untuk PAD) menjadi andal dan valid untuk pengujian hipotesis. Dengan demikian, model ini secara metodologis kuat ia telah menangani heterogenitas tidak teramat (*fixed effect*) dan telah menjamin keabsahan kesimpulan signifikansi dengan mengoreksi dampak dari heteroskedastisitas. Kesimpulan bahwa PAD signifikan sementara variabel lain tidak, didukung oleh *p*-value yang kini terbebas dari bias.

Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1367.268	605.2378	-2.259059	0.0278
PAD	3.450319	0.293163	11.76927	0.0000
DAU	3.213619	0.922179	3.484810	0.0010
DBH	-0.279707	0.438015	-0.638578	0.5257
SILPA	1.457766	0.815964	1.786557	0.0794

Gambar 8. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2025)

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa secara individual, variabel PAD dan DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas 0,0000 dan 0,0010 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05, serta t hitung yang melampaui t tabel. Di sisi lain, variabel DBH dan SiLPA tidak memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sebagaimana terlihat dari koefisien -0,279707 dengan t hitung -0,638578 yang kurang dari t tabel $\pm 2,650$, serta probabilitas 0,5257 dan 0,0794 yang melebihi batas 0,05. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ketika DBH dan SiLPA mengalami penurunan, belanja daerah justru cenderung meningkat, sehingga menciptakan hubungan positif antara SiLPA dan belanja daerah. Berdasarkan temuan tersebut, Dapat dikatakan bahwa pengaruh DBH dan SiLPA terhadap belanja daerah secara parsial tidak signifikan

b. Uji Simultan (Uji F)

Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.927462	Mean dependent var	1896.647	
Adjusted R-squared	0.910623	S.D. dependent var	1098.141	
S.E. of regression	328.2997	Akaike info criterion	14.60259	
Sum squared resid	6035720.	Schwarz criterion	15.05229	
Log likelihood	-497.0906	Hannan-Quinn criter.	14.78121	
F-statistic	55.07789	Durbin-Watson stat	1.570970	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Gambar 9. Hasil Uji F

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2025)

Analisis simultan menghasilkan nilai F sebesar 55.07789 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Studi ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) memiliki dampak signifikan terhadap kondisi wilayah. Artinya, keseluruhan variabel bebas tersebut secara bersamaan dapat menjelaskan perubahan variabel terikat

dengan signifikan. Hasil ini memperkuat bahwa model regresi yang diterapkan memiliki kelayakan dan validitas untuk menganalisis keterkaitan antar variabel tersebut, sebab uji F secara statistik membuktikan bahwa tidak seluruh koefisien regresi bernilai nol secara bersamaan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa model regresi ini memiliki kapasitas prediksi yang memadai untuk menjelaskan dampak variabel PAD, DAU, DBH, dan SILPA terhadap belanja daerah secara menyeluruh. Hasil uji simultan ini mengonfirmasi hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga analisis regresi data panel dalam penelitian ini memiliki kredibilitas yang kuat.

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.927462	Mean dependent var	1896.647
Adjusted R-squared	0.910623	S.D. dependent var	1098.141
S.E. of regression	328.2997	Akaike info criterion	14.60259
Sum squared resid	6035720.	Schwarz criterion	15.05229
Log likelihood	-497.0906	Hannan-Quinn criter.	14.78121
F-statistic	55.07789	Durbin-Watson stat	1.570970
Prob(F-statistic)	0.000000		

Gambar 10. Hasil Uji R2

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2025)

Pengujian koefisien determinasi model regresi menunjukkan R-squared bernilai 0,927462. Angka tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen dalam model berkontribusi menjelaskan 92,7462% variasi yang terjadi, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Besarnya nilai ini mengindikasikan bahwa model regresi mampu menjelaskan hampir seluruh variasi perubahan dalam belanja daerah melalui kombinasi variabel-variabel tersebut. Adapun sisanya sebesar 7,2538 persen

diperkirakan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan sebagai variabel independen dalam analisis ini. Hal ini mencerminkan adanya variabel pengganggu atau komponen error yang turut memberi kontribusi terhadap perubahan belanja daerah, yang meskipun tidak teramat, tetapi memiliki peran dalam variabilitas data.

Selain itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,910623 memberikan penegasan tambahan terhadap kualitas model yang digunakan. Faktor-faktor ini mempengaruhi jumlah variabel dalam model serta ukuran sampel, yang mengakibatkan perkiraan yang lebih akurat mengenai kemampuan model untuk menjelaskan variabel-variabel data. Tingginya nilai Adjusted R-squared menandakan bahwa model tetap memiliki kekuatan prediksi yang sangat baik walaupun memperhitungkan faktor koreksi akibat penambahan variabel independen. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang diterapkan memiliki kemampuan penjelasan yang tinggi dan reliabel untuk menggambarkan pengaruh variabel PAD, DAU, DBH, dan SILPA terhadap belanja daerah, sehingga validitas analisis dan kesimpulan penelitian dapat dipercaya dengan tingkat keyakinan yang tinggi.

Analisis Flypaper Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1367.268	605.2378	-2.259059	0.0278
PAD	3.450319	0.293163	11.76927	0.0000
DAU	3.213619	0.922179	3.484810	0.0010
DBH	-0.279707	0.438015	-0.638578	0.5257
SILPA	1.457766	0.815964	1.786557	0.0794

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.927462	Mean dependent var	1896.647	
Adjusted R-squared	0.910623	S.D. dependent var	1098.141	
S.E. of regression	328.2997	Akaike info criterion	14.60259	
Sum squared resid	6035720.	Schwarz criterion	15.05229	
Log likelihood	-497.0906	Hannan-Quinn criter.	14.78121	
F-statistic	55.07789	Durbin-Watson stat	1.570970	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Gambar 11. Hasil Regresi Data Panel

Sumber: Eviews 12 (Data diolah, 2025)

Temuan estimasi regresi dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara spesifik, koefisien PAD mencapai 3,460319 dengan probabilitas 0,0000 dan t-statistik 11,76927, yang menggambarkan bahwa setiap penambahan PAD senilai Rp 1 miliar akan mendorong kenaikan belanja daerah sebesar Rp 3,460 miliar, dengan derajat signifikansi yang sangat kuat ($p\text{-value} < 0,00$). Temuan ini menunjukkan bahwa dampak PAD terhadap belanja daerah sangat nyata. bersifat positif, sangat kuat, dan dapat diandalkan secara statistik, di mana PAD memiliki efek multiplier lebih dari dua kali lipat terhadap belanja daerah.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) juga menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, dengan koefisien 3,213619, $p\text{-value}$ 0,00010, dan t-statistik 3,484810. Interpretasi ini mengindikasikan bahwa setiap pertambahan DAU sebesar Rp 1 miliar maka berkontribusi pada peningkatan belanja daerah sebesar Rp 3,484 miliar, yang secara jelas menunjukkan bahwa peningkatan DAU mendorong ekspansi belanja daerah secara signifikan dengan efek multiplier yang lebih besar.

Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap belanja daerah, sebagaimana dibuktikan oleh koefisie sebesar -0,279707, dengan probabilitas 0,5267 dan statistik t -0,638578, yang secara teoritis mengimplikasikan penurunan belanja daerah sebesar 0,638 miliar rupiah akibat kenaikan satu miliar rupiah pada DBH. Namun, karena probabilitas melebihi ambang batas 0,05, hubungan ini tidak memiliki validitas

statistik yang kuat, sehingga DBH dianggap tidak memberikan sumbangan esensial dalam memvariasi belanja daerah berdasarkan model yang diuji.

Analisis serupa berlaku pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), di mana koefisien 1,457766, probabilitas 0,0794, dan statistik t 1,786557 menunjukkan potensi kenaikan belanja daerah hingga 1,457 miliar rupiah untuk setiap tambahan satu miliar rupiah pada SILPA. Meskipun arahnya negatif, ketidakmencapaian signifikansi ($p > 0,05$) menegaskan bahwa SILPA tidak berperan signifikan dalam dinamika model regresi, kemungkinan karena sifatnya sebagai indikator efisiensi anggaran yang tidak selalu berkorelasi langsung dengan ekspansi belanja.

Selain itu, intercept (C) dalam model ini memiliki nilai negatif sebesar -1367,268 dengan nilai probabilitas 0,0278 yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas diasumsikan bernilai nol, maka dari itu belanja daerah cenderung memiliki nilai negatif dalam konteks model ini, meskipun secara praktis kondisi tersebut jarang terjadi.

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, secara parsial arah pengaruh masing-masing variabel berbeda. Variabel PAD menunjukkan dampak positif signifikan dengan koefisien paling tinggi pada belanja daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah membiayai belanja publik. Hasil ini mengindikasikan PAD sebagai faktor dominan pendorong belanja daerah di

NTB yang merefleksikan kemandirian fiskal optimal.

Selanjutnya, variabel DAU juga berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Ini mengonfirmasi peran vital dana transfer pusat dalam mendukung program pembangunan daerah. Namun, mengingat pengaruh PAD lebih besar daripada DAU, maka flypaper effect tidak teridentifikasi di Provinsi NTB. Kondisi ini menandakan bahwa pemerintah daerah telah mampu memanfaatkan dana transfer secara efisien tanpa kehilangan kemandirian fiskal.

Berbeda dengan variabel lainnya, Dana Bagi Hasil (DBH) justru menunjukkan koefisien negatif terhadap belanja daerah. Artinya, peningkatan DBH di Provinsi Nusa Tenggara Barat diikuti oleh penurunan proporsional pada belanja daerah. Secara teori, DBH seharusnya berperan mendorong peningkatan belanja karena merupakan sumber dana tambahan dari pemerintah pusat. Namun, hasil negatif ini dapat dijelaskan melalui hipotesis perilaku fiskal konservatif (*fiscal conservatism hypothesis*) dan teori ketidakpastian pendapatan transfer.

Menurut (Prud'homme, 1995), ketika sumber pendapatan daerah bersifat tidak stabil dan bergantung pada faktor eksternal, seperti harga komoditas atau penerimaan sumber daya alam, pemerintah daerah cenderung bersikap hati-hati dalam meningkatkan belanja publik. Mereka khawatir kenaikan DBH hanya bersifat sementara, sehingga lebih memilih untuk menahan belanja atau mengalokasikan sebagian dana sebagai cadangan fiskal untuk menjaga stabilitas di tahun berikutnya. Kondisi ini sejalan dengan teori intertemporal smoothing yang dikemukakan oleh Barro (1979) dalam (Safuan et al., 2013), yang menjelaskan bahwa pemerintah berusaha menstabilkan pengeluaran dari waktu ke

waktu agar tidak terjadi fluktuasi fiskal yang ekstrem. Selain itu, mekanisme penyaluran DBH yang sering terlambat dan bergantung pada realisasi penerimaan pusat juga dapat menyebabkan tidak sinkronnya antara kenaikan DBH dan peningkatan belanja daerah. Dengan demikian, hubungan negatif antara DBH dan belanja daerah dalam penelitian ini mencerminkan bahwa peningkatan DBH tidak selalu direspon dengan peningkatan belanja, karena pemerintah daerah di NTB cenderung menerapkan kebijakan fiskal yang konservatif dan berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian transfer pusat.

Sementara itu, variabel SiLPA menunjukkan koefisien positif namun tidak signifikan pada belanja daerah. Artinya, peningkatan SiLPA tahun lalu akan meningkatkan belanja daerah tahun berjalan. Kondisi ini merefleksikan kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan sisa anggaran secara produktif dan berkesinambungan untuk mendukung program pembangunan periode berikutnya.

Studi ini menyediakan bukti empiris yang penting mengenai tidak adanya Flypaper Effect di Provinsi NTB selama periode 2018–2024, di mana pendapatan asli daerah (PAD) memiliki dampak yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Zakaria dan Lathifah (2024) di Provinsi Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa beberapa daerah tidak mengalami *flypaper effect* karena pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dominan dibandingkan dana transfer terhadap belanja daerah. Kesamaan hasil ini mengindikasikan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat cenderung lebih mandiri dalam pembiayaan belanja, sehingga

ketergantungan terhadap dana pusat semakin menurun.

PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan estimasi model regresi data panel belanja daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018–2024, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memberikan pengaruh yang bervariasi. Variabel PAD menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Temuan ini menunjukkan tingginya responsivitas fiskal pemerintah daerah di NTB terhadap pendapatan internal, yang mengindikasikan bahwa ekspansi belanja lebih didorong oleh mobilisasi sumber daya fiskal lokal dibandingkan ketergantungan pada transfer pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien terhadap belanja daerah. Hasil ini mengonfirmasi peran strategis dana transfer pusat dalam mendukung kapasitas fiskal daerah. Namun, karena koefisien PAD lebih tinggi dibandingkan DAU, fenomena flypaper effect tidak terdeteksi di NTB, yang mengindikasikan pemerintah daerah telah mampu mengelola pendapatan secara otonom dan efisien.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori konservativisme fiskal (fiscal conservatism hypothesis), dimana pemerintah daerah menerapkan kehati-hatian dalam ekspansi belanja sebagai respons terhadap karakteristik DBH yang volatil dan bergantung pada fluktuasi penerimaan negara, khususnya dari sektor ekstraktif sumber daya alam.

Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan, mengimplikasikan bahwa pemanfaatannya dalam mendorong belanja daerah di NTB masih belum optimal. Akumulasi SiLPA kemungkinan lebih dipengaruhi oleh efisiensi pelaksanaan anggaran dan keterlambatan realisasi belanja, sehingga dampaknya terhadap belanja tahun berjalan belum signifikan secara statistik, yang mengindikasikan perlunya optimalisasi mekanisme perencanaan dan pemanfaatan SiLPA agar lebih efektif dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan temuan penelitian mengindikasikan tidak terdeteksinya flypaper effect di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Responsivitas belanja terhadap PAD yang lebih tinggi dibanding dana transfer pusat menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan kemandirian fiskal serta mengelola keuangan publik secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, NTB dapat dikategorikan sebagai salah satu daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang relatif mandiri dan berorientasi pada efektivitas dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian yang mengonfirmasi pengaruh positif signifikan PAD dan DAU terhadap belanja daerah sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh signifikan, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperkuat kemandirian fiskal serta efektivitas

pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pertama, optimalisasi PAD perlu menjadi prioritas utama melalui perluasan basis pajak dan retribusi daerah serta peningkatan efisiensi dalam sistem pemungutan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan inovasi digital, seperti penerapan layanan pembayaran pajak berbasis elektronik, guna meningkatkan transparansi, mengurangi kebocoran penerimaan, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kedua, dana transfer pusat, khususnya DAU, sebaiknya dikelola secara lebih strategis. Meskipun kontribusinya signifikan terhadap belanja daerah, pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap dana tersebut dengan memfokuskan penggunaannya pada kegiatan produktif yang mampu menumbuhkan pendapatan daerah di masa depan, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketiga, karena DBH menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih berhati-hati terhadap sumber dana yang sifatnya fluktuatif. Penyusunan rencana keuangan berbasis risiko dapat membantu daerah mengantisipasi ketidakpastian penerimaan DBH yang bergantung pada kondisi ekonomi nasional, terutama dari sektor sumber daya alam.

Keempat, pemanfaatan SiLPA perlu diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sisa anggaran dengan perencanaan yang matang agar dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas fiskal di tahun berikutnya, misalnya melalui investasi publik, peningkatan

pelayanan dasar, atau pembangunan infrastruktur daerah.

Terakhir, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan daerah menjadi hal yang krusial. Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi aparatur pengelola anggaran melalui pelatihan berkelanjutan serta memperkuat sistem pengawasan internal agar setiap penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari PAD maupun dana transfer, dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2020). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Widya Ganecwara*, 10(4). <https://doi.org/10.36728/jwg.v10i4.1216>
- Dewi, S. R. (2017). Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Journal of Accounting Science*, 1(2), 155–174. <https://doi.org/10.21070/jas.v1i2.956>
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273>
- Fikri, F. (2020). Flypaper Effect Analysis on Regional Expenditure in East Java Province, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi*

- Pembangunan, 21(2).
<https://doi.org/10.18196/jesp.21.2.5045>
- Halunga, A. G., Orme, C. D., & Yamagata, T. (2017). A heteroskedasticity robust Breusch–Pagan test for contemporaneous correlation in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 198(2), 209–230.
<https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2016.12.005>
- Istiqomah, M., & Amran, E. (2021). Analisis Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Bali Dan Nusa Tenggara Tahun 2014-2018. *Media Ekonomi*, 29(1), 37–52.
<https://doi.org/10.25105/me.v29i1.9357>
- Meilyana Putri Setiawan, & Komang Krishna Yogantara. (2022). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Journal Research of Accounting*, 4(1), 49–62.
<https://doi.org/10.51713/jarac.v4i1.168>
- Millo, G. (2017). Robust standard error estimators for panel models: A unifying approach. *Journal of Statistical Software*, 82(3).
<https://doi.org/10.18637/jss.v082.i03>
- Mokosolang, C., Prang, J., & Mananohas, M. (2015). Analisis Heteroskedastisitas Pada Data Cross Section dengan White Heteroscedasticity Test dan Weighted Least Squares. *D'CARTESIAN*, 4, 172.
<https://doi.org/10.35799/dc.4.2.2015.9056>
- Mukriyanto, K. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016–2020. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4), 477–486.
<https://doi.org/10.36418/jist.v3i4.405>
- Naraswari Wira, P. E., & Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2019–2021). *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 115–125.
<https://doi.org/10.23887/vjra.v12i3.68938>
- Nareswari Adyanindita Kusumawardhani Kusyala, & Badrudin, R. (2023). Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 14–27.
<https://doi.org/10.53916/jeb.v17i1.31>
- Prud'homme, R. (1995). The Danger of Decentralisation. *The World Bank Observer*, 10(2), 201–220.
- Purnamawati, A., & Making, L. S. K. (2021). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Jurnal Manajemen Dan Perbankan*, 8(2), 51–65.
- Rizki Ramadhani, Farah Nisa Ul Albab, & Aryan Danil Mirza. BR. (2022). Does Flypaper Effect Really Exist? Evidence From Government Budget in East Indonesia. *International Journal of Business, Humanities, Education and Social Sciences (IJBHES)*, 4(2), 46–52.
<https://doi.org/10.46923/ijbhes.v4i2.185>
- Safuan, S., Jenderal Perbendaharaan, D., & Keuangan, K. R. (2013).

- Analisis Keseimbangan Eksternal Indonesia: Pendekatan Intertemporal Model of Current Account Analysis of Indonesian External Balance: Intertemporal-Model Approach of Current Account. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13(2), 196–213.
<https://doi.org/10.21002/jepi.v13i2.06>
- Septriani, S. (2023). Does the Flypaper Effect Phenomenon Occur on the Financial Performance of Provincial Governments in Indonesia? *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(12), 6133–6140.
<https://doi.org/10.47191/jefms/v6i12-41>
- Siregar, O. K., Rahima Br Purba, & Tri Dessy Ratna Sari. (2025). Flypaper Effect and Fiscal Illusion in Village Financial Management: A Case Study of KP Village. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(2), 1061–1074.
<https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i2.3161>
- Sofhia, S., & Priyambodo, V. K. (2024). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Kota Mataram. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(3), 839–849.
<https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i3.1425>
- Yani Rizal, Safuridar, & Muhammad Ayub Siregar. (2021). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 133–145.
- <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4223>
- Zakaria¹, R. A., & Nurul Lathifah². (2024). 1 , 2 1,2. *Jurnal Riset Ekonomi*, 3(5), 543–554.